

AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK TERHADAP PEKERJAAN DI DESA CIMERANG KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dewi Rara Aniyati¹ dewiraraa07@gmail.com

R. Enkeu Agiati² agiatienu@yahoo.co.id

Sakroni³ sakroniateng@yahoo.co.id

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Abstract

Accessibility is an amenity given to persons with physical disabilities to reach work. The purpose of this study is to examine the characteristics of subjects, accessibility of persons with physical disabilities before social advocacy, accessibility of persons with physical disabilities to types of work, agency / business treatment of persons with disabilities to provide employment, accessibility of persons with physical disabilities after social advocacy, and constraints of persons with physical disabilities in obtaining employment. The method used in this study is a qualitative method with action research research design. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are in-depth interviews, documentation studies, participatory observation, and focus group discussions. The results of the study are that persons with physical disabilities can access to work using social advocacy. Types of work that can be accessed according to the skills possessed by persons with disabilities. The treatment of the business community to provide employment for persons with physical disabilities has begun to be implemented, namely by providing employment for persons with physical disabilities. People with physical disabilities can already work in convection by working as a tailor, making pants. The wages given by the convection owner are in accordance with the number of pants that can be completed by persons with physical disabilities.

Keywords:

Accessibility; persons with physical disabilities; work; social advocacy

Abstrak

Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat fisik untuk mencapai pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa karakteristik subjek, aksesibilitas penyandang disabilitas fisik sebelum advokasi sosial, aksesibilitas penyandang disabilitas fisik ke jenis pekerjaan, agensi / perlakuan bisnis penyandang disabilitas untuk menyediakan pekerjaan, aksesibilitas penyandang disabilitas. cacat fisik setelah advokasi sosial, dan kendala orang-orang cacat fisik dalam mendapatkan pekerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian action research. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan

diskusi kelompok fokus. Hasil dari penelitian ini adalah para penyandang cacat fisik dapat mengakses pekerjaan menggunakan advokasi sosial. Jenis pekerjaan yang dapat diakses sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh para penyandang cacat. Perlakuan komunitas bisnis untuk menyediakan lapangan kerja bagi para penyandang cacat fisik sudah mulai diterapkan, yaitu dengan menyediakan lapangan kerja bagi para penyandang cacat fisik. Orang dengan cacat fisik sudah dapat bekerja dalam konveksi dengan bekerja sebagai penjahit, membuat celana. Upah yang diberikan oleh pemilik konveksi sesuai dengan jumlah celana yang dapat diisi oleh penyandang cacat fisik.

Kata Kunci:

Aksesibilitas; orang-orang cacat fisik; kerja; advokasi sosial

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas pada hakikatnya memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti warga negara pada umumnya. Apabila diberikan hak dan kesempatan yang sama, penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan yang sama seperti orang lain, akan tetapi hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas nyatanya masih belum sepenuhnya diperoleh. Oleh karena itu diperlukan kerjasama baik dari pemerintah maupun masyarakat, agar penyandang disabilitas dapat memperoleh hak dan kesempatan yang sama.

Pengertian penyandang disabilitas berdasarkan UPIAS (dalam Smith, 2009:18) sebagai berikut:

Disability is the loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the community on an equal level with others due to physical and social barrier.

Definisi di atas memiliki arti, disabilitas adalah kehilangan atau keterbatasan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal masyarakat pada tingkat yang sama dengan yang lain karena hambatan fisik dan sosial.

Permasalahan penyandang disabilitas semakin berkembang baik secara jumlah maupun kompleksitasnya. Permasalahan penyandang disabilitas berasal dari dalam individu penyandang disabilitas maupun dari luar penyandang disabilitas. Permasalahan yang berasal dari dalam diri penyandang disabilitas seperti rendah diri, menutup diri, sedangkan permasalahan dari luar penyandang disabilitas contohnya adalah aksesibilitas yang belum tersedia, adanya

penilaian negatif dari lingkungan, dan sebagainya.

Salah satu permasalahan bagi penyandang disabilitas adalah hak aksesibilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum diperoleh, hal tersebut dapat dilihat dari masih sulitnya penyandang disabilitas untuk bekerja di dunia usaha yang ada di masyarakat. Termasuk dalam memperoleh pelatihan kerja dan pengembangan keterampilanpun, penyandang disabilitas masih sulit dalam mendapatkan kesempatan tersebut.

Barker, Robert L (2014:66) berpendapat bahwa:

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Penyandang disabilitas yang sudah mencapai usia dewasa perlu mendapatkan akses ke dunia pekerjaan agar dapat menjalani kehidupan secara mandiri.

Tidak selamanya penyandang disabilitas bergantung kepada orang lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas seharusnya mulai diperhatikan baik itu oleh pemerintah, dunia usaha, maupun oleh masyarakat. Menurut Notoatmojo (2010:14) pekerjaan adalah sebagai berikut:

Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang baik yang menghasilkan material maupun non material. Menghasilkan material apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan non material tidak untuk

mencukupi kebutuhan seperti pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga.

Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih dikatakan rendah, baik itu kesempatan kerja di instansi pemerintah maupun di sektor swasta. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat belum dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas. Selain itu instansi maupun dunia usaha masih belum menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dapat dilihat dari perekrutan pegawai untuk penyandang disabilitas yang belum disediakan oleh sebagian besar dunia usaha.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika mengakses pekerjaan, kendala-kendala tersebut yaitu kurangnya informasi bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan, belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan lain-lain. Keadaan tersebut sampai sekarang masih terus diperbaiki oleh pemerintah, namun persoalan ini bukanlah persoalan yang mudah, oleh karena itu diperlukan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat agar penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan.

Adanya Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mengatur dan memberikan kesamaan hak dan kesempatan pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya diperhatikan oleh sektor pemerintah maupun swasta. Peraturan di sektor pemerintahan mewajibkan penyediaan 1% dari jumlah pegawai yang ada belum sepenuhnya terealisasi. Begitu pula di perusahaan swasta, padahal di dalam undang-undang perusahaan swasta mewajibkan untuk

menerima penyandang disabilitas sebesar 2% dari jumlah pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan data dari SIM-PD Indonesia pada tahun 2011, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 3,11% atau sebesar 6,7 juta jiwa. Merujuk data Sakernas BPS tahun 2016, prevalensi penyandang disabilitas usia produktif (diatas 15 tahun) jumlahnya mencapai 22,9 juta jiwa atau 12,15% dari total penduduk usia produktif di Indonesia. Angka tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 44 persen dibanding pada tahun 2015.

Populasi penyandang disabilitas di Jawa Barat pada tahun 2010 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yaitu mencapai 1.219.331 jiwa. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, di Bandung Barat sendiri terdapat 5.678 jiwa penyandang disabilitas. Berdasarkan data dari Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Desa Cimerang pada tahun 2017 terdapat 67 orang penduduk yang mengalami kedisabilitas, dengan 7 orang penyandang disabilitas fisik berusia 18 tahun sampai dengan 56 tahun tidak bekerja. Jumlah penyandang disabilitas dan anak penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

No	Ragam Disabilitas	Jumlah	%
1	Fisik	17	25.37
2	Sensorik (rungu-wicara)	16	23.88
3	Sensorik (netra)	6	8.95

4	Intelektual	13	19.41
5	Mental	11	16.42
6	Ganda	4	5.97
Jumlah		67	100.00

Sumber : *Pendataan Praktikum SPI STKS Bandung Tahun 2018*

Tabel 1 menunjukkan bahwa ragam penyandang disabilitas di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat mayoritas (25.37%) adalah penyandang disabilitas fisik. Hal ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik sangat perlu untuk ditangani. Penanganan penyandang disabilitas fisik di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah mengenai pekerjaan yang belum dapat diperoleh penyandang disabilitas.

Mengingat data penyandang disabilitas yang berjumlah 17 orang di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, hal tersebut menjadi persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan apabila tidak dipikirkan bersama. Lokasi penelitian yang bertempat di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, salah satu permasalahan penyandang disabilitas yaitu mengenai masalah aksesibilitas.

Aksesibilitas penyandang disabilitas di desa ini masih belum mendapatkan perhatian, baik itu dari pemerintahan desa setempat, maupun dari masyarakat. Permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat meliputi aksesibilitas pekerjaan, kesehatan, saran dan prasarana, serta transportasi.

Berdasarkan permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik di

Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, yang paling dirasakan oleh penyandang disabilitas fisik yaitu mengenai aksesibilitas terhadap pekerjaan. Penyandang disabilitas fisik masih belum dapat mengakses pekerjaan, baik itu dari segi aksesibilitas fisik maupun non fisik. Penyandang disabilitas fisik yang belum mendapatkan pekerjaan baik dari segi fisik maupun non fisik disebabkan oleh faktor internal (dari dalam penyandang disabilitas) maupun faktor eksternal (dari luar penyandang disabilitas).

Berdasarkan segi aksesibilitas fisik, penyandang disabilitas belum dapat menjangkau pekerjaan di perusahaan yang ada di sekitar Desa Cimerang dan belum mempunyai keterampilan tertentu. Berdasarkan segi non fisik, penyandang disabilitas fisik di desa ini masih belum mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, belum dapat menjangkau pelatihan kerja, dan termasuk belum memahami kemampuan dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan kurang aktifnya penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas dalam mencari informasi dan juga pemerintah desa yang kurang memperhatikan penyandang disabilitas.

Hasil kegiatan praktikum menunjukkan aksesibilitas penyandang disabilitas beberapa sudah diperoleh, tetapi belum dapat dikatakan memadai. Faktor utama yang menjadi kendala yaitu kurangnya kesadaran baik dari penyandang disabilitas itu sendiri, keluarga penyandang disabilitas, masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Permasalahan lain yang sering terjadi diantaranya minimnya sumber informasi yang dapat menjangkau keluarga

dan penyandang disabilitas itu sendiri yang berkenaan dengan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas fisik dan keluarga penyandang disabilitas fisik menunggu adanya bantuan dari pihak lain untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi, yaitu masih belum dapat mengakses pekerjaan. Sebenarnya mereka sudah mencari informasi untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang akan digunakan sebagai keterampilan dalam mengakses pekerjaan. Akan tetapi, hingga proses pelaksanaan praktikum keterampilan baru dapat diakses, yaitu pelatihan keterampilan menjahit.

Pelaksanaan pelatihan keterampilan yang diperoleh penyandang disabilitas belum maksimal, karena pelatihan keterampilan hanya empat hari dan hanya sebatas pelatihan untuk membuat dompet dan keset. Oleh karena itu penyandang disabilitas masih harus mendapatkan pelatihan keterampilan yang memadai untuk mendukung penyandang disabilitas agar mempunyai keterampilan yang memadai. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk permasalahan tersebut adalah menggunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* yang kemudian diimplementasikan dengan menggunakan teknik advokasi sosial.

Rencana penelitian sebagai tindak lanjut dari proses praktikum, yaitu dengan menggunakan advokasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik untuk mengakses pekerjaan. Advokasi sosial menurut Woodside & Legg (dalam Scheineider, Robert L 2011:71) menjelaskan bahwa advokasi sosial adalah tindakan individu atau kelompok untuk membela hak-hak terhadap kekurangan kekuasaan yang

lain. Tujuan advokasi menurut Miller & Convey (2012:39) adalah:

Melakukan perubahan dalam melakukan perubahan selalu akan terjadi pro-kontra, resistensi dan konflik, tegasnya tidak ada faktor yang pasti untuk keberhasilan advokasi.

Perencanaan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema yang sudah ditentukan bersama penyandang disabilitas, orangtua penyandang disabilitas, aparat pemerintah Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, dunia usaha, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana karakteristik subjek ?, 2) Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik sebelum dilakukan advokasi sosial ?, 3) Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap jenis-jenis pekerjaan?, 4) Bagaimana perlakuan instansi/dunia usaha terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan, 5) Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik sesudah dilakukan advokasi sosial?, dan 6) bagaimana kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan?

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang: 1) Karakteristik subjek, 2) Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik sebelum dilakukan advokasi sosial, 3) Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik

terhadap jenis-jenis pekerjaan, 4) Perlakuan dunia usaha terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan, 5) Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik sesudah dilakukan advokasi, dan 6) Kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan.

Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktek pekerjaan sosial dan memperkaya ilmu pengetahuan dan teknik-teknik dalam aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan. Manfaat praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah penyandang disabilitas fisik dalam aksesibilitas pekerjaan dan memberikan kontribusi kepada stakeholder dalam membuat kebijakan atau program aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan.

KAJIAN KONSEPTUAL

Aksesibilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *accessibility* yang berarti masuk atau mudah dicapai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia aksesibilitas berarti hal yang dapat dijadikan akses. Barker, Robert L (2014:66) berpendapat bahwa aksesibilitas adalah sebagai berikut:

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Contoh, sebuah lembaga sosial dengan aksesibilitas yang lebih besar terletak di dekat klien, buka pada waktu yang tepat, mempertahankan daftar tunggu yang lebih pendek, memiliki biaya terjangkau dan memiliki tenaga, sumberdaya, pengaturan, kebijakan yang membuat klien merasa diterima.

Aksesibilitas terdiri dari dua jenis yaitu fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan. Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem.

Berdasarkan pengertian aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan, baik itu berupa sarana dan prasarana, transportasi, lingkungan publik, pekerjaan, dan lainnya. Apabila ditujukan kepada penyandang disabilitas, maka aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesamaan kesempatan dalam memenuhi hak mereka.

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Menurut Suparno (2009:17), disabilitas fisik adalah kondisi seseorang yang mengalami kelainan fisik, yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak. Pengertian disabilitas fisik dari *White House Conference* (dalam Sutjihati Somantri, 2012:121) adalah sebagai berikut:

Disabilitas fisik merupakan suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga

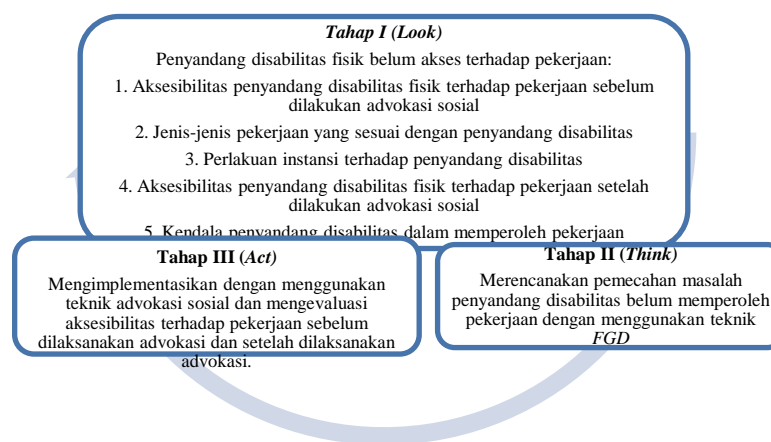
disebabkan oleh pembawaan sejak lahir.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Lincoln dkk dalam Moleong (2012:11) adalah penelitian yang fokus

kerangka dasar yaitu tahap *look* (melihat) yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Tahap *think* (berfikir) yaitu melakukan perencanaan berdasarkan informasi yang diperoleh. Tahap *act* (bertindak) yaitu mengimplementasikan dan melakukan evaluasi.

Berdasarkan tahap *action research* menurut Stringer, tahap penelitian



Bagan I Modifikasi Tahap Action Research

pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian tindakan (*action research*). Stringer (2007:19) menyatakan bahwa *action research* yaitu rangkaian kegiatan bersama yang berkelanjutan antara pihak terkait dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi rangkaian upaya untuk mencapai perubahan status pola pikir, pandang, kerja, dan sikap baru yang disadari sebagai tindakan yang bersifat dinamis terhadap perubahan selanjutnya.

Action research berbasis masyarakat dalam Stringer (2007:20) memiliki

aksesibilitas penyangang disabilitas fisik terhadap pekerjaan sesuai dengan tahap spiral interaksi terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap *look* dengan melihat kembali aksesibilitas penyangang disabilitas fisik terhadap pekerjaan sebelum dilakukan advokasi sosial, tahap *think* yaitu melakukan perencanaan dengan menggunakan teknik *FGD*, dan tahap *act* dengan menggunakan teknik advokasi sosial.

Tahap penelitian tersebut dilaksanakan berdasarkan tahap *action research interacting spiral* menurut Stringer yang dilakukan dengan tahap 1 *look*, tahap 2 *think*, dan tahap 3 *act*. Lebih jelasnya, tahap penelitian aksesibilitas penyangang disabilitas fisik terhadap pekerjaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

Tahap *look* (melihat) yaitu melakukan pengumpulan informasi dengan melakukan asesmen ulang terhadap fokus penelitian yaitu jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan penyandang disabilitas, penerimaan instansi terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan yang sesuai, dan kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, dalam tahap *look* dilakukan studi literatur mengenai konsep aksesibilitas, konsep penyandang disabilitas fisik, konsep tentang pekerjaan, dan konsep tentang pekerjaan sosial bidang penyandang disabilitas.

Tahap *think* (berpikir) yaitu menyusun rencana berdasarkan hasil informasi yang relevan dari penyandang disabilitas, orangtua penyandang disabilitas, pengurus RBM, aparat pemerintah desa, dan Dinas Sosial. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD)/diskusi terfokus berkelompok.

Tujuan pelaksanaan FGD yaitu memfasilitasi diskusi *stakeholders* tentang advokasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik terhadap aksesibilitas pekerjaan, perlakuan instansi/dunia usaha terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan, kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan, dan upaya yang dilakukan untuk mengakses pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik. Pelaksanaan FGD menghasilkan komitmen dari partisipan untuk membantu penyandang disabilitas mengakses pekerjaan.

Tahap *act* yaitu tahap pelaksanaan dan evaluasi aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan yang dilakukan

dengan teknik advokasi sosial. Advokasi sosial yaitu kegiatan yang digunakan dalam menolong penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh pekerjaan. Advokasi sosial dilakukan bekerja sama dengan *stakeholder* yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bandung Barat, Bappeda Kabupaten Bandung Barat, Aparat Pemerintah Desa Cimerang, dan Dunia Usaha.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur hasil akhir (sebelum dan sesudah dilakukan advokasi) dari aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Evaluasi yang diukur mengenai fokus permasalahan dalam penelitian, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan penyandang disabilitas fisik, penerimaan instansi terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan, dan kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang langsung didapat dari subjek penelitian yaitu dua orang penyandang disabilitas fisik, orangtua penyandang disabilitas fisik, pengurus RBM, aparat Desa Cimerang, dan Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Sumber data diperoleh secara *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Sumber data sekunder adalah catatan, laporan hasil penelitian, buku-buku pedoman, data-data statistik penyandang disabilitas, dokumen-dokumen

penyandang disabilitas dan kajian literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), studi dokumentasi, observasi partisipatif (*participative observation*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan empat pengujian, yaitu uji kepercayaan (*credibility*), uji keteralihan (*transferability*), uji ketergantungan (*dependability*), dan uji kepastian (*confirmability*).

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis yang didahului dengan mengumpulkan data yang diperlukan secara keseluruhan dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema serta polanya.

HASIL PENELITIAN

Sumber : Profil Desa Cimerang Tahun 2018

Tabel 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

No	Usia (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	271	276	547	8.31
2	5-9	416	382	798	9.10
3	10-14	406	425	831	9.49
4	15-19	398	406	804	9.27
5	20-24	417	400	817	9.22
6	25-29	396	393	789	9.10
7	30-34	366	352	718	8.28
8	35-39	418	388	806	9.29
9	40-44	346	323	669	7.21
10	45-49	249	286	535	6.17
11	50-54	191	166	357	4.11
12	55-59	173	156	329	3.35
13	> 59	333	327	660	7.20
Jumlah		4380	4280	8660	100.00

Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Cimerang merupakan salah satu desa di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Desa ini berada di perbatasan antara Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Batujajar, dengan memiliki batas wilayah dengan Desa Cipeundeuy, Desa Laksanamekar, Desa Cangkorah, Desa Cimareme dan Desa Cikande. Selain itu Desa Cimerang berbatasan langsung dengan waduk Saguling sebagai perbatasan wilayah bagian bawah Desa Cimerang.

Jarak dari Kantor Desa Cimerang ke tempat tinggal penyandang disabilitas berjarak 1 km. Tempat tinggal penyandang disabilitas dilalui dengan jalan dengan kondisi naik turun dan melewati galengan sawah. Jalan tersebut hanya dapat dilalui dengan mengendarai sepeda motor atau jalan kaki. Desa Cimerang memiliki jumlah penduduk sebesar 8660 jiwa, yang terdiri dari 2523 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan rentang usia di Desa Cimerang seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia di Desa Cimerang, mayoritas (9.22%) adalah penduduk usia 20-24 tahun dengan jumlah 817 jiwa. Jumlah penduduk Desa Cimerang yang paling banyak, sesuai dengan subjek penelitian dengan usia 20 tahun dan 24 tahun. Jumlah penyandang disabilitas pada rentang usia tersebut berjumlah 7 orang dan mengalami masalah aksesibilitas pekerjaan.

Desa Cimerang merupakan kawasan industri dan juga kawasan pertanian dimana penduduknya memiliki mata pencaharian beragam di berbagai sektor. Sesuai dengan lahan yang tersedia di wilayah tersebut, mata pencaharian jasa dan pertanian mendominasi

penduduk Desa Cimerang. Tabel berikut menunjukkan sebaran mata pencaharian di Desa Cimerang:

Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Cimerang Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Pertanian	299	218	517	16.01
2	Jasa	1398	1370	2768	76.41
3	Peternakan	84	0	84	2.60
4	Perdagangan	96	65	161	4.98
	Jumlah	1877	1653	3230	100.00

Sumber : Profil Desa Cimerang Tahun 2018

Tabel 3 menunjukkan bahwa penduduk Desa Cimerang mayoritas (76.41%) memiliki mata pencaharian di bidang jasa. Mata pencaharian di bidang jasa penduduk Desa Cimerang yaitu sebagai karyawan

pabrik, buruh, sopir, dan lain-lain yang pada umumnya memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keadaan tersebut mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu penyandang disabilitas, karena untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya pun masih terbatas.

Mata pencaharian di bidang jasa dapat digunakan untuk mengakseskan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik. Contoh mata pencaharian di bidang jasa yang dapat digunakan untuk mengakseskan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik adalah sebagai karyawan pabrik. Apabila penyandang disabilitas fisik diakseskan pekerjaan sebagai karyawan, penyandang disabilitas akan memiliki penghasilan dan salah satu haknya terpenuhi. Berikut adalah data lapangan kerja di lokasi penelitian yang dapat digunakan untuk mengakseskan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik.

Karakteristik Subjek

subjek SN dan UY memiliki usia dengan kelompok usia produktif. Pada usia produktif seseorang memiliki gagasan dan berorientasi terhadap pekerjaan, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyandang disabilitas fisik memiliki masalah utama yaitu aksesibilitas terhadap pekerjaan.

Kedua subjek berada pada tahap perkembangan dewasa awal, salah satu tugas perkembangan pada tahap dewasa awal adalah mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas dan mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh.

Tingkat pendidikan SN dan UY sebatas lulusan SD dan memiliki keterampilan terbatas, yaitu keterampilan menjahit dan itu pun menjahit untuk pakaian yang sederhana serta membuat produk seperti keset dan kerudung berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Keduanya mengalami keterbatasan pada kondisi fisiknya, yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena dalam kondisi fisik yang seperti itu, SN dan UY tidak dapat bekerja terlalu berat.

Berkaitan dengan hal tersebut, keduanya memiliki kesulitan dalam mengakses pekerjaan, maka perlu dilakukan advokasi sosial agar penyandang disabilitas fisik terakses ke pekerjaan. Bentuk advokasi sosial yang dilakukan dengan membuat perencanaan bersama dengan pemerintah setempat, penyandang disabilitas, pengurus RBM Desa Cimerang, dan *stakeholder* yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Dinas Ketenagakerjaan Bandung Barat, serta dunia usia yang ada di sekitar Desa Cimerang. Hasil perencanaan yang dilakukan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan atau advokasi sosial agar penyandang disabilitas terakses oleh dunia pekerjaan, disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik terhadap Pekerjaan Sebelum Advokasi Sosial

Kondisi awal penyandang disabilitas fisik yang mengalami permasalahan terhadap aksesibilitas pekerjaan, belum pernah mendapatkan perlakuan dari *stakeholder*. Penyandang disabilitas fisik tidak memahami kemampuan diri, belum mempunyai keterampilan, belum mendapatkan pelatihan kerja, dan tidak dapat mengakses pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut menjadi dasar pelaksanaan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan melalui advokasi sosial.

Advokasi sosial yang dilakukan pada proses awal yaitu dengan menghubungkan penyandang disabilitas fisik ke pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik yaitu berupa pelatihan menjahit sesuai dengan keinginan dan ketertarikan subjek. Pelatihan menjahit diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada Bulan Oktober 2018. Setelah selesai mengikuti pelatihan menjahit, subjek diberikan peralatan berupa mesin jahit agar pelatihan yang sudah diberikan dapat dilanjutkan sendiri.

Pelatihan menjahit yang sudah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat kepada subjek, belum dapat diajalkan secara maksimal karena adanya beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain produk yang dibuat oleh subjek tidak dapat dipasarkan dengan mudah, kurangnya modal untuk melanjutkan membuat produk, dan tidak adanya pengawasan lebih lanjut dari *stakeholder*. Subjek kurang berminat dalam usaha ekonomi produktif dan lebih

berminat bekerja dengan orang lain agar langsung menerima upah tanpa harus memikirkan pemasaran produk yang dibuat oleh subjek. Hasil asesmen ulang aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Pemahaman kemampuan diri penyandang disabilitas fisik terhadap jenis-jenis pekerjaan

Subjek sudah memahami jenis pekerjaan yang ingin ditekuni yaitu dengan melanjutkan menjahit sesuai dengan pelatihan kerja. Hanya saja keduanya masih belum mempunyai kemampuan yang optimal dan masih perlu untuk mendapatkan pelatihan lagi.

Hasil observasi yang menunjukkan bahwa kedua subjek sudah memiliki pemahaman tentang jenis pekerjaan yang ingin ditekuni. Jenis pekerjaan yang diinginkan oleh kedua subjek yaitu menjahit, namun keterampilan yang dimiliki oleh subjek masih kurang dan harus mendapatkan pelatihan kembali. Pelatihan menjahit yang pernah diajarkan yaitu dengan membuat produk keset, dompet, serta kerudung, subjek menginginkan pelatihan hingga dapat membuat pakaian agar dapat mengakses pekerjaan ke konveksi dengan bekal kemampuan tersebut.

2. Keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik

Pemahaman diri akan jenis pekerjaan yang ingin ditekuni, didukung oleh keterampilan yang dimiliki oleh subjek. Keterampilan yang dimiliki oleh subjek yaitu keterampilan menjahit, serta mengurus rumah seperti memasak, membersihkan rumah.

Dasar keterampilan yang dimiliki oleh subjek dapat dikembangkan guna mengakses pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki yaitu keterampilan menjahit yang dilakukan bekerjasama dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Hanya saja keterampilan yang dimiliki oleh subjek perlu ditingkatkan karena dalam mengakses pekerjaan dibutuhkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya advokasi sosial bagi subjek agar dapat mempunyai keterampilan lebih sebagai dasar mengakses pekerjaan.

3. Kegiatan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas fisik

Subjek hanya mengikuti pelatihan kerja sebanyak satu kali ketika diberikan informasi oleh peneliti. Informasi untuk mendapatkan pelatihan kerja belum dapat diakses oleh subjek, selain itu mahal biaya untuk mengikuti kursus menjadi hambatan subjek dalam mengikuti pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cimerang belum disebarluaskan di masyarakat hingga merata.

Kegiatan pelatihan kerja masih sulit diakses oleh subjek karena kurangnya informasi dari *stakeholder*. Kurangnya informasi kegiatan pelatihan kerja didukung oleh pernyataan RO selaku Sekretaris Desa Cimerang ketika pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)*, bahwa pihak dinas tidak pernah memberikan informasi hingga ke tingkat desa jika ada kegiatan pelatihan

kerja untuk penyandang disabilitas. Kegiatan pelatihan kerja di desa untuk ke depannya juga akan dievaluasi agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dibutuhkan adanya kerjasama baik dari pihak Dinas Sosial maupaun Dinas Tenaga Kerja, pemerintah Desa Cimerang, dan penyandang disabilitas agar kegiatan pelatihan kerja dapat diakses.

4. Perlakuan instruktur terhadap penyandang disabilitas ketika melatih keterampilan menjahit

Subjek dalam mengikuti kegiatan pelatihan menjahit, dilatih oleh instruktur/pelatih menjahit yang sudah bekerja sama oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Perlakuan instruktur dalam memberikan pelatihan menjahit kepada penyandang disabilitas dinilai baik oleh subjek. Instruktur yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat sudah terbiasa melatih penyandang disabilitas, sehingga mengerti apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan subjek ketika melatih keterampilan menjahit. Perlakuan instruktur yang baik kepada subjek menjadikan subjek dapat menangkap keterampilan menjahit yang diajarkan kepada subjek oleh instruktur.

5. Informasi lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik

Setelah mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit, subjek berharap dapat terakses ke pekerjaan. Ketika mengakses pekerjaan, subjek mencari informasi tentang pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki namun tidak mendapatkan informasi apapun. Sebelum mengikuti pelatihan

menjahit, subjek pernah mencoba mengakses informasi pekerjaan, namun dunia usaha yang ada di sekitar tempat tinggal subjek tidak memberikan informasi secara terbuka ketika terdapat rekrutmen pegawai.

6. Aksesibilitas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di lingkungan sekitar

Terdapat banyak perusahaan di Desa Cimerang, namun sebagian besar perusahaan yang ada belum menyediakan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Perusahaan seharusnya menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa setiap perusahaan wajib menyediakan minimal 1% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut masih belum dapat dijalankan oleh sebagian perusahaan.

Perlakuan Instansi/Dunia Usaha terhadap Penyandang Fisik untuk Menyediakan Pekerjaan

1. Instansi/dunia usaha menyebarluaskan rekrutmen bagi penyandang disabilitas

Perlakuan instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan salah satunya dapat diketahui dengan adanya penyebaran rekrutmen pegawai bagi penyandang disabilitas. Namun perusahaan yang ada belum menyebarluaskan rekrutmen pegawai. Sesuai dengan hasil *FGD* yang disampaikan oleh kepala sif PT Jamafac, bahwa perusahaannya tidak menyebarluaskan informasi mengenai

perekrutan pegawai, informasi biasanya hanya disebarluaskan melalui pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut.

Perusahaan di sekitar Desa Cimerang belum menyebarkan informasi rekrutmen pegawai khususnya bagi penyandang disabilitas. Lain halnya dengan instansi pemerintahan yang sudah menyebarkan informasi apabila ada perekrutan pegawai baru. Penyebarluasan informasi rekrutmen pegawai menjadi hal yang penting khususnya bagi penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas dapat mengakses informasi tersebut.

2. Kriteria penyandang disabilitas yang diterima oleh instansi/dunia usaha

Instansi/dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan membuat kriteria sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Namun untuk penerimaan penyandang disabilitas, dunia usaha belum menetapkan kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima di perusahaan.

Penyandang disabilitas tidak mengetahui tentang kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima bekerja di instansi/dunia usaha. Berdasarkan hasil *FGD*, AS selaku kepala sift menjelaskan bahwa perusahaannya belum menetapkan kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima bekerja di PT Jamafac. Berbeda dengan TK yang berpendapat bahwa kriteria yang dapat diterima di instansi adalah penyandang disabilitas fisik dengan tingkat kedisabilitas ringan, disabilitas netra dengan adanya beberapa persyaratan lain seperti pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, dan lain-lain.

3. Proses penerimaan instansi/dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Perekrutan pegawai di sebuah instansi/dunia usaha terdapat proses penerimaan dari mulai mendaftar hingga dapat diterima oleh suatu instansi/dunia usaha. Namun proses penerimaan instansi/dunia untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum diketahui oleh subjek. Sesuai dengan hasil *FGD*, belum terdapat proses penerimaan dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena dunia usaha belum menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, hanya saja ketika terdapat pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan menjadi disabilitas, perusahaan akan tetap mempekerjakan pegawai tersebut. Lain halnya dengan instansi, dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sudah terdapat prosesnya dalam pengumuman perekrutan pegawai baru dan instansi sudah menyediakan kuota untuk penyandang disabilitas. Proses penerimaan untuk penyandang disabilitas di instansi, disamakan dengan proses penerimaan pada umumnya dengan mengikuti alur yang sudah ditetapkan.

4. Perlakuan instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik yang belum sepenuhnya dilaksanakan, instansi sudah menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu, sedangkan sebagian besar dunia usaha

belum menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Subjek ketika melamar pekerjaan tidak diterima di perusahaan tempat subjek melamar, keduanya berpendapat tidak diterimanya bekerja di perusahaan karena kondisi subjek yang mengalami disabilitas. Namun dunia usaha tidak memberhentikan pegawai yang sudah bekerja dan mengalami kecelakaan kerja hingga menyebabkan disabilitas merupakan langkah awal yang baik.

5. Sarana dan prasarana yang disediakan instansi/dunia usaha bagi penyandang disabilitas

Instansi/dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh sarana dan prasarana agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan mudah. Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pekerjaan.

Sesuai hasil observasi ke beberapa dunia usaha di Desa Cimerang, perusahaan sebagian besar belum menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, tangga yang belum dilengkapi jalur untuk kursi roda dan pintu belum otomatis adalah contoh bahwa dunia usaha belum menyediakan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh subjek. Berdasarkan hasil *FGD*, hampir seluruh dunia usaha belum menyediakan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Hanya saja ketika di perusahaan terdapat pegawai disabilitas, penyandang disabilitas ditempatkan di posisi sesuai dengan kemampuan.

6. Dukungan instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Instansi/dunia usaha belum mendukung untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Belum ada kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima bekerja di dunia usaha dan belum adanya proses yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas merupakan contoh belum adanya dukungan dari dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan.

Berdasarkan hasil *FGD*, dunia usaha di Desa Cimerang belum menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, hanya sebatas menyediakan pekerjaan bagi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami disabilitas. Dukungan dalam CSR yang seharusnya diberikan oleh dunia usaha belum menyentuh ke bidang penyandang disabilitas, CSR biasanya berbentuk pembagian sembako kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Pelaksanaan Advokasi Sosial

1. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD dilaksanakan di Aula Desa Cimerang pada Hari Kamis, 25 April 2019 pukul 09.00 s/d 12.00 dihadiri oleh Kasie Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, aparat pemerintah Desa Cimerang, pengurus RBM Desa Cimerang, dunia usaha dari PT Jamafac dan Konveksi Singgih 11, serta perwakilan penyandang disabilitas dan orangtua/keluarga penyandang disabilitas.

Tujuan dilakukannya *FGD* yaitu memfasilitasi diskusi stakeholders

tentang advokasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik terhadap aksesibilitas pekerjaan, aksesibilitas pekerjaan penyandang disabilitas fisik, penerimaan instansi terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan, kendala penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan, dan upaya yang dilakukan untuk mengakses pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik

Dinas Sosial sebagai *leading sector* dalam permasalahan penyandang disabilitas masih sebatas memberikan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas dan merujuk ke panti ketika penyandang disabilitas memenuhi persyaratan. Ketika selesai pelatihan maupun keluar dari panti, dibekali peralatan yang dibutuhkan ketika mengikuti pelatihan. Namun hanya sampai disitu, dinas sosial tidak melakukan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut bagi penyandang disabilitas agar mereka benar-benar memanfaatkan keterampilan yang sudah didapatkan.

Dunia usaha belum menyediakan pekerjaan untuk penyandang disabilitas, dunia usahanya sebatas mempekerjakan penyandang disabilitas yang memang sudah mempunyai status sebagai pegawai di perusahaan namun mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan mereka mengalami disabilitas. Namun dalam perekrutan awal dunia usaha belum menyediakan khusus untuk penyandang disabilitas. padahal dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib mempekerjakan

penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah pekerja yang ada.

Hasil dari *Focus Group Discussion* yaitu dengan adanya komitmen dari dunia usaha yaitu Konveksi Singgih 11 yang menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dengan menerapkan cara maklun. Kondisi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas, akhirnya diterapkan caramaklun tersebut, yaitu pemilik konveksi mengantarkan bahan-bahan dasar kepada penyandang disabilitas, untuk selanjutnya penyandang disabilitas menyelesaikan proses menjahit di tempat tinggalnya.

2. Implementasi

Advokasi sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah mencari akar permasalahan, merencanakan penyelesaian masalah, membangun kesadaran, tindakan kebijakan. Mencari akar permasalahan dilakukan dengan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh Kasie Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, pemilik Konveksi Singgih 11, Kepala Sift PT Jamafac, Aparat Desa Cimerang, pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Desa Cimerang, serta perwakilan penyandang disabilitas fisik dan keluarga penyandang disabilitas

Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah, perencanaan dilakukan di hari kedua setelah adanya *FGD*. Perencanaan dilakukan bersama-sama dengan *stakeholder* dan penyandang disabilitas fisik agar terakses oleh pekerjaan. Beberapa perencanaan yang tersusun

yaitu mengakses penyandang disabilitas ke pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki yaitu keterampilan menjahit dan melaksanakan ekonomi produktif. Berdasarkan kesepakatan partisipan yang hadir, mengakses penyandang disabilitas ke pekerjaan merupakan solusi bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses pekerjaan.

Selanjutnya yaitu membangun kesadaran *stakeholder* (dunia usaha) agar mau menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik. Dunia usaha yang hadir dalam pertemuan *FGD* aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas diberikan penalaran apabila permasalahan yang ada tidak ada solusi, maka akan menimbulkan masalah baru.

Hasil dari membangun kesadaran ini dengan adanya tindakan, Konveksi Singgih 11 menyediakan pekerjaan membuat celana dan baju tidur bagi penyandang disabilitas fisik. Konveksi Singgih 11 menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik dengan sistem maklun, yaitu mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat celana dan baju tidur ke tempat tinggal penyandang disabilitas. Tindakan tersebut diambil agar penyandang disabilitas fisik tidak terhambat oleh jarak tempat tinggal yang jauh dari konveksi. Sebelum penyandang disabilitas diberikan pekerjaan, terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk membuat celana dan

baju tidur oleh pegawai Konveksi Singgih 11.

Pemilik konveksi menawarkan untuk melakukan sistem maklun yaitu dengan mengirim bahan-bahan dasar ke tempat tinggal penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat mengerjakan pekerjaan di rumah. Kegiatan ini merupakan solusi dari permasalahan jauhnya tempat tinggal penyandang disabilitas terhadap perusahaan dan penyandang disabilitas tidak dapat melakukan aktivitas yang berat.

Pemilik konveksi memberikan pekerjaan kepada subyek berupa menjahit celana pendek, bahan-bahan serta benang untuk menjahit diantarkan ke tempat tinggal penyandang disabilitas. Upah yang diterima oleh penyandang disabilitas sebesar Rp 2.000,00 untuk setiap celana dan Rp 5.000,00 untuk setiap pakaian tidur yang dapat diselesaikan. Dalam mengerjakan celana dan pakaian tidur, dari mulai bahan diberikan kepada penyandang disabilitas, penyandang disabilitas diberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan proses penjahitan tersebut. Jumlah yang diberikan untuk minggu pertama yaitu bahan yang cukup digunakan untuk membuat 30 potong celana. Apabila kedepannya penyandang disabilitas dapat menyelesaikan lebih cepat, maka jumlah bahan yang diberikan juga akan ditambahkan oleh pemilik konveksi.

Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Sesudah Advokasi Sosial

1. Penyandang disabilitas fisik memahami kemampuan diri terhadap pekerjaan yang ingin ditekuni

Setelah dilakukan advokasi sosial dan diberikan motivasi serta arahan, subjek lebih yakin dalam memahami kemampuan diri terhadap pekerjaan yang ingin ditekuni. Awal mulanya subjek masih mengalami keraguan terhadap kemampuan diri terhadap jenis pekerjaan yang ingin ditekuni. Namun setelah dilakukan advokasi sosial, subjek sudah memahami akan kemampuan dirinya.

Pemahaman akan kemampuan diri sudah diyakini oleh kedua subjek, ditambah dengan terkasesnya pekerjaan sesuai dengan kemauan subjek. Kemampuan diri yang dimiliki oleh kedua subjek yaitu menjahit celana, advokasi sosial yang telah dilakukan yaitu dengan mengakses subjek ke konveksi Singgih 11 dengan membuat celana pendek. Berdasarkan pernyataan subjek, dalam membuat celana masih dikatakan mudah dilakukan karena tidak membutuhkan pola yang rumit.

2. Keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik

Keterampilan yang dimiliki oleh subjek yaitu menjahit, keterampilan ini dimiliki oleh subjek setelah subjek memahami kemampuan diri untuk mengakses jenis pekerjaan yang ingin ditekuni. Keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti pelatihan pertama kali yaitu dapat membuat produk keset, dompet, dan kerudung. Setelah dilakukan advokasi sosial, subjek mempunyai keterampilan tambahan yaitu membuat

celana, yang sebelumnya dilatih oleh pegawai konveksi Singgih 11.

Keterampilan membuat celana didapatkan oleh subjek setelah dilakukan advokasi sosial. Meskipun ketika subjek terakses oleh pekerjaan belum mempunyai keterampilan tersebut, pemilik konveksi berbaik hati untuk melatih membuat celana terlebih dahulu. Pelatihan membuat celana dilaksanakan selama dua hari oleh pegawai Konveksi Singgih 11 di tempat tinggal subjek.

3. Kegiatan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas fisik

Keterampilan yang dimiliki oleh subjek didapatkan ketika subjek mengikuti pelatihan kerja. Pelatihan kerja didapatkan oleh subjek setelah advokasi sosial, dengan dilatih membuat celana sesuai bidang pekerjaan yang akan diakses oleh kedua subjek. Subjek mendapatkan pelatihan kerja dari pegawai Konveksi 11 selama dua hari yang dilaksanakan di tempat tinggal subjek SN.

Dilaksanakannya pelatihan kerja bagi subjek dapat memperoleh hasil aksesibilitas pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Subjek sudah memiliki keterampilan tambahan yaitu membuat celana dan sudah terkases pekerjaan ke Konveksi Singgih 11. Pelaksanaan advokasi sosial efektif untuk mengakses subjek ke dunia usaha dan mendapatkan upah berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan.

4. Perlakuan instruktur terhadap penyandang disabilitas ketika melatih keterampilan menjahit

Perlakuan instruktur dalam melatih keterampilan menjahit dinilai baik oleh kedua subjek, meskipun instruktur yang

melatih berbeda ketika sebelum dilaksanakn advokasi dan setelah advokasi, keduanya dinilai baik oleh subjek. Perlakuan instruktur yang baik dalam melatih keterampilan menjahit mempengaruhi subjek dalam mengikuti keterampilan. Instruktur yang ramah dan baik kepada subjek membuat subjek lebih dapat menguasai keterampilan menjahit yang diajarkan karena tidak sungkan untuk bertanya jika ada hal yang belum dapat dimengerti.

5. Penyandang disabilitas fisik mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan

Informasi lowongan pekerjaan belum didapatkan oleh subjek karena subjek tidak mencari informasi lowongan pekerjaan. Subjek mendapatkan tawaran oleh pemilik konveksi Singgih 11 untuk bekerja di konveksi miliknya dengan sistem maklun, yaitu mengirimkan bahan-bahan untuk mebuat celana ke tempat tinggal subjek dan dikerjakan di tempat tinggalnya. Pekerjaan ini sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh subjek dan tidak mendapatkan masalah mengenai jarak yang harus ditempuh karena dikerjakan di tempat tinggal subjek.

6. Penyandang disabilitas fisik dalam mengakses pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar

Subjek sudah dapat mengakses pekerjaan di lingkungan sekitar setelah dilakukannya advokasi sosial. Pekerjaan di lingkungan sekitar yang dapat diakses oleh subjek yaitu bekerja menjahit celana dan pakaian tidur dengan mendapatkan upah Rp 2.000,00 untuk setiap celana dan Rp 5.000,00 untuk setiap pakaian tidur yang sudah selesai dijahit.

Subjek sudah terkases ke pekerjaan di sekitar tempat tinggal subjek di konveksi Singgih 11. Konveksi Singgih 11 lebih memberikan kemudahan kepada subjek dengan mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek, agar subjek tidak perlu datang jauh ke konveksi. Namun subjek harus terus berlatih agar dapat menghasilkan produksi yang lebih banyak agar pendapatan yang diterima juga lebih banyak.

Perlakuan Instansi/Dunia Usaha terhadap Penyandang Disabilitas Fisik untuk Menyediakan Pekerjaan

1. Instansi/dunia usaha menyebarkan rekrutmen bagi penyandang disabilitas

Instansi/dunia usaha belum dapat menyebarkan rekrutmen apabila membutuhkan pegawai tambahan walaupun sudah dilaksanakan advokasi sosial. Dunia usaha belum dapat menyebarkan rekrutmen apabila terdapat lowongan pekerjaan. Sesuai dengan pernyataan kepala sift bahwa penyebaran rekrutmen tidak dapat dilakukan secara cepat karena membutuhkan perencanaan. Advokasi sosial belum dapat dilakukan dalam hal penyebaran rekrutmen pegawai di dunia usaha karena untuk menyebarkan informasi rekrutmen pegawai membutuhkan perneencanaan yang matang.

2. Kriteria penyandang disabilitas yang diterima oleh instansi/dunia usaha

Kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan untuk bekerja sesuai posisi yang dibutuhkan. Kriteria

penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha adalah penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha adalah penyandang disabilitas dengan tingkat derajat rendah agar dalam menjalankan pekerjaan tidak terbebani. Hal tersebut disampaikan oleh TK dan RA ketika pelaksanaan advokasi sosial.

3. Proses penerimaan instansi/dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Proses penerimaan dunia usahasetelah pelaksanaan advokasi sosial, dunia usaha tidak menerapkan proses penerimaan. Ketika pelaksanaan advokasi sosial, pemilik konveksi berkomitmen untuk memberikan akses kepada subjek agar dapat bekerja. Setelah pelaksanaan advokasi sosial, tanpa memasukkan lamaran kerja subjek dapat langsung bekerja menjahit dengan sistem maklun.

Dunia usaha yang berkomitmen dalam mengakses pekerjaan kepada subjek tidak menerapkan proses tertentu, subjek tidak perlu melamar pekerjaan terlebih dahulu, namun langsung diterima bekerja di konveksi Singgih 11. Subjek terlebih dahulu menerima pelatihan membuat celana selama dua hari oleh pegawai yang sudah lama bekerja di konveksi. Seharusnya dunia usaha menerapkan proses perekrutan agar subjek mengumpulkan administrasi ke konveksi tempat subjek bekerja.

4. Perlakuan instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Konveksi Singgih 11 menyediakan pekerjaan kepada subjek dan memberikan perlakuan baik kepada subjek walaupun belum dapat membuat produk celana, namun pemilik konveksi memberikan kesempatan kepada subjek untuk berlatih terlebih dulu. Subjek memberikan penilaian positif kepada pemilik konveksi Singgih 11 karena sudah menyediakan pekerjaan bagi subjek walaupun subjek belum dapat membuat celana. Pemilik konveksi memberikan pelatihan terlebih dulu kepada subjek untuk membuat celana selama dua hari dengan mengirimkan pegawai yang sudah lama bekerja di konveksi tersebut. Selain itu konveksi Singgih 11 juga mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjahit ke tempat tinggal subjek.

5. Sarana dan prasarana yang disediakan instansi/dunia usaha bagi penyandang disabilitas

Konveksi menyediakan sarana untuk subjek yaitu dengan mengantarkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek. Subjek juga dapat melakukan pekerjaan membuat celana di tempat tinggalnya tanpa harus mendatangi konveksi untuk bekerja. Sarana yang disediakan oleh pemilik Konveksi Singgih yaitu dengan mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek. Upah juga langsung diberikan kepada subjek setelah subjek menyelesaikan

pekerjaanya. Selain itu pemilik konveksi juga memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada subjek sebelum subjek bekerja membuat celana.

6. Dukungan instansi/dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas

Dukungan yang diberikan oleh pemilik konveksi Singgih 11 kepada subjek yaitu dengan menyediakan pekerjaan dengan menggunakan sistem maklun. Sistem maklun ini mempermudah subjek dalam melakukan pekerjaan karena pekerjaan dapat dilakukan di tempat tinggal subjek. Pemilik Konveksi Singgih 11 memberikan dukungan kepada subjek dalam menyediakan pekerjaan dengan sistem maklun yaitu mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek. Sistem maklun ini memberikan kemudahan bagi subjek karena subjek tidak mendapatkan kendala dalam mengakses ke tempat bekerja. Subjek mendapatkan kemudahan dengan tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bekerja di konveksi, namun pekerjaan dapat dilakukan di tempat tinggal subjek.

Kendala Penyandang Disabilitas Fisik dalam Memperoleh Pekerjaan

1. Kendala penyandang disabilitas untuk memahami kemampuan diri terhadap jenis pekerjaan

Subjek memiliki kendala yang berbeda dalam memahami kemampuan diri terhadap jenis pekerjaan yang akan ditekuni, SN mengalami kendala tidak dapat mengembangkan keterampilan

yang dimiliki seorang diri sehingga masih kurang memahami kemampuan diri. Subjek UY mempunyai kendala sebelumnya belum memiliki keterampilan, namun setelah memiliki keterampilan, UY dapat memahami kemampuan dirinya terhadap jenis pekerjaan yang akan ditekuninya.

Setelah subjek memahami kemampuan diri terhadap jenis pekerjaan yang akan ditekuni, keduanya sama-sama ingin bekerja sebagai penjahit. Pekerjaan tersebut diinginkan oleh kedua subjek karena keduanya pernah mengikuti pelatihan kerja menjahit yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Setelah dilaksanakan advokasi sosial, subjek mendapatkan tawaran bekerja di Konveksi Singgih 11 untuk membuat celana.

2. Kendala penyandang disabilitas untuk menjangkau pelatihan kerja

Subjek mengungkapkan bahwa kendala dalam mengakses pelatihan kerja adalah tidak adanya informasi kepada subjek mengenai pelatihan kerja, baik yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta pelatihan kerja yang diadakan oleh Desa Cimerang. Informasi pelatihan kerja belum disebarkan sampai ke subjek, padahal subjek membutuhkan informasi tersebut. Stakeholder seharusnya menyebarkan informasi tentang pelatihan kerja sampai ke tingkat bawah, agar penyandang disabilitas yang membutuhkan pelatihan kerja dapat ikut serta dalam pelatihan.

Setelah dilakukakn advokasi sosial, pelatihan kerja dapat diakses oleh subjek

dengan mengikti pelatihan kerja yaitu menjahit yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu subjek juga mendapatkan pelatihan kerja dari Konveksi Singgih 11 dengan dilatih membuat celana. Ketika subjek sudah lancar dalam membuat celana, selanjutnya subjek akan dilatih oleh pegawai Konveksi Singgih 11 untuk membuat pakaian tidur dan baju tidur.

3. Kendala penyandang disabilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan pelatihan kerja

Kendala yang dihadapi oleh subjek SN yaitu sulit beradaptasi karena belum mengenal peserta lain yang mengikuti pelatihan kerja serta malu untuk bertanya kepada instruktur yang mengarkan pelatihan kerja menjahit. Berbeda dengan UY yang memiliki kendala minder karena kondisi fisiknya dan mengalami kebingungan karena belum pernah mengikuti pelatihan menjahit. Namun setelah beberapa lama kedua subjek dapat membaur kepada peserta lain yang mengikuti pelatihan kerja menjahit.

Berbeda halnya ketika subjek mendapatkan pelatihan kerja dari Konveksi Singgih 11, kedua subjek dapat membaur dengan cepat dan aktif bertanya ketikan mendapatkan pelatihan kerja membuat celana. Pelatihan tersebut dilakukan di tempat tinggal subjek SN selama dua hari. Pelatihan kerja dilakukan kepada subjek agar dapat terkases ke pekerjaan di Konveksi Singgih 11.

4. Kendala penyandang disabilitas dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan

Subjek SN bersikap pasrah dalam menghadapi persaingan untuk mendapat pekerjaan karena subjek tidak dapat bekerja berat. Subjek UY memiliki kendala dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yaitu karena kurangnya keterampilan yang dimiliki dan pendidikannya yang kurang. Kendala-kendala tersebut yang membuat subjek bersikap pasrah terhadap persaingan untuk mendapatkan pekerjaan.

5. Kendala penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan

Kendala subjek untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan yaitu ketidaktahuan subjek kepada siapa harus bertanya adanya lowongan pekerjaan. Selain itu subjek juga memiliki kendala yaitu dunia usaha tidak menyebarluaskan informasi perekrutan pegawai khususnya bagi penyandang disabilitas. Sebagian besar perusahaan di Desa Cimerang bahkan belum menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

6. Kendala penyandang disabilitas untuk mengakses pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar

Kendala subjek dalam mengakses pekerjaan di lingkungan sekitar yaitu jarak tempat tinggal yang jauh dari perusahaan, kondisi jalan menuju tempat tinggal subjek masih sulit untuk dilalui karena melewati galengan sawah. Selain itu kendala subjek dalam mengakses pekerjaan di lingkungan sekitar adalah pendidikan subjek kurang dan keterampilan yang dimilikipun terbatas.

PEMBAHASAN

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan. Aksesibilitas merupakan salah satu hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas sebagai warga negara, agar memperoleh kesempatan yang sama seperti orang lain. Aksesibilitas memiliki dua jenis, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

Permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan adalah jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal penyandang disabilitas dengan dunia usaha. Kondisi jalan menuju tempat tinggal penyandang disabilitas masih sulit dilalui karena jalan masih berupa tanah galengan. Kondisi awal aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan yaitu sudah mempunyai keterampilan untuk membuat dompet, keset, sarung bantal, dan menjahit kerudung.

Proses pemasaran untuk kerajinan yang dihasilkan oleh subjek sulit dipasarkan karena tempat tinggal yang sulit diakses dan terbatasnya tempat untuk memasarkan produk kerajinan. Tempat pemasaran produk kerajinan dititipkan di toko kelontong yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal subjek, sehingga untuk menitipkan ke toko subjek tidak dapat melaksanakannya sendiri. Selain itu penjualan mengalami kesulitan karena produk yang dipasarkan kurang mendapat minat. Hal tersebut yang menjadi dasar tidak dilanjutkannya pembuatan kerajinan.

Pekerjaan yang dapat diakses di sekitar tempat tinggal subjek penelitian adalah pertanian, karena banyaknya lahan sawah yang ada di sekitar tempat tinggal

subjek dan dimungkinkan untuk diakses oleh subjek. Namun karena subjek memiliki keterbatasan dalam bergerak dan beraktivitas, pekerjaan yang dilakukan oleh subjek di bidang pertanian tidak dapat berjalan lama karena ketidaksanggupan subjek untuk bekerja.

Siklus ketiga dilakukan dengan kembali memaksimalkan keterampilan yang dimiliki oleh subjek penelitian yaitu keterampilan menjahit. Namun dalam hal ini keterampilan yang dimiliki oleh subjek penelitian perlu mendapatkan pengembangan keterampilan agar keterampilan yang dimiliki lebih dapat digunakan untuk mengakses pekerjaan. Pekerjaan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas yaitu bekerja di konveksi atau menjahit di tempat tinggalnya agar dapat memanfaatkan peralatan yang dimiliki oleh subjek dan subjek tidak terhambat oleh jarak tempat tinggal yang cukup jauh.

Kondisi awal penyandang disabilitas fisik belum memperoleh hak aksesibilitas terhadap pekerjaan karena belum adanya dukungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat masih belum terdorong untuk berpartisipasi dalam penanganan penyandang disabilitas yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih agar masyarakat turut serta dalam pengentasan kebutuhan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang belum terkases oleh pekerjaan disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam memahami kemampuan diri, keterbatasan keterampilan yang dimiliki, dan pendidikan yang kurang yang dimiliki oleh subjek. Faktor tersebut merupakan faktor internal subjek tidak dapat

mengakses pekerjaan. Namun dalam mengatasi masalah tersebut, penyandang disabilitas dapat berusaha menyelesaikannya sendiri dengan dibantu oleh pihak lain karena permasalahan yang dihadapi masih mudah untuk diselesaikan.

Selain itu yang membuat subjek belum terakses oleh pekerjaan yaitu tidak dapat menjangkau kegiatan pelatihan kerja. Subjek tidak dapat menjangkau pelatihan kerja dikarenakan informasi pelatihan kerja tidak disebarkan kepada masyarakat. Apabila *stakeholder* mampu menyebarkan informasi pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sampai ke masyarakat, pelatihan kerja yang dilakukan akan sangat bermanfaat karena dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang memerlukan pelatihan kerja.

Informasi lowongan pekerjaan dan perekrutan pegawai bagi penyandang disabilitas belum dapat dilaksanakan oleh sebagian besar dunia usaha. Selain itu dunia usaha belum menetapkan kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima bekerja. Sarana dan prasarana juga belum disediakan oleh dunia usaha, agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang belum terakses ke pekerjaan dilaksanakan dengan advokasi sosial agar setelah dilakukannya advokasi sosial, penyandang disabilitas dapat terkases ke pekerjaan. Pelaksanaan advokasi sosial dilaksanakan dengan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* terlebih dahulu, untuk memfasilitasi stakeholder berdiskusi tentang aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan. *FGD* dilaksanakan untuk menggali isu aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan dan

melakukan perencanaan untuk menyelesaikan isu tersebut.

Pihak perusahaan belum mampu menyediakan formasi untuk penyandang disabilitas, mereka baru mempekerjakan penyandang disabilitas yang memang sudah mempunyai status sebagai pegawai di perusahaan namun mengalami kevelakaan kerja yang menyebabkan mereka mengalami disabilitas. Namun dalam perekrutan awal dunia usaha belum menyediakan khusus untuk penyandang disabilitas. padahal dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah pekerja yang ada.

Hasil dari *Focus Group Discussion* yaitu dengan adanya komitmen dari dunia usaha yang Konveksi Singgih 11 yang menyediakan akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dengan menerapkan sistem maklun. Kondisi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas, akhirnya diterapkan sistem maklun tersebut, yaitu pemilik konveksi mengantarkan bahan-bahan dasar kepada penyandang disabilitas, untuk selanjutnya penyandang disabilitas menyelesaikan proses menjahit di tempat tinggalnya.

Advokasi sosial bagi penyandang disabilitas dinilai dapat mengatasi masalah penyandang disabilitas yang belum terkases oleh pekerjaan. Adanya advokasi sosial dengan sebelumnya dilaksanakan *FGD*, membuat penyandang disabilitas dapat terkases oleh pekerjaan, yaitu dengan bekerja di Konveksi Singgih 11. Selain itu advokasi sosial dapat menyelesaikan permasalahan dalam topik penelitian.

Subjek memahami kemampuan diri sendiri terhadap jenis pekerjaan yang ingin ditekuni setelah mendapatkan pelatihan kerja menjahit. Pelatihan kerja menjahit yang didapatkan oleh subjek berpengaruh kepada keterampilan yang dimiliki oleh subjek. Dengan subjek memahami kemampuan diri dan mempunyai keterampilan, lebih memudahkan advokasi sosial yang dilakukan untuk mengakses subjek ke dunia usaha yaitu dengan terkasesnya subjek bekerja di Konveksi Singgih 11.

Setelah bekerja di Konveksi Singgih 11, subjek dapat menjangkau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan. Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan disediakan oleh pemilik konveksi dengan memberikan pelatihan menjahit celana kepada subjek. Apabila subjek dapat membuat celan dengan lancar, pemilik Konveksi Singgih 11 akan memberikan pelatihan lain yaitu pelatihan menjahit pakaian tidur dan baju tidur. Kedua pelatihan kerja tidak dilakukan bersama karena untuk membuat pakaian tidur dan baju tidur, dibutuhkan tingakn konsentrasi dan tingkat kerajinan yang lebih dari subjek.

Perlakuan instruktur kepada subjek dinilai baik karena dalam meberikan pelatihan, instruktur melatih dengan sabar dan dilakukan dengan sedikit bercanda agar proses pelatihan menjahit tidak membosankan. Perlakuan instruktur tersebut mempengaruhi subjek dalam bertindak, sehingga ketika ada hal yang tidak dimengerti, subjek berani untuk menanyakannya kepada instruktur. Subjek tidak merasa sungkan untuk bertanya karena

sikap instruktur yang rama dan baik terhadap subjek.

Informasi lowongan pekerjaan belum didapatkan oleh subjek karena informasi lowongan pekerjaan tidak disebarluaskan oleh dunia usaha. Subjek mendapatkan tawaran oleh pemilik konveksi Singgih 11 untuk bekerja di konveksi miliknya dengan sistem maklun, yaitu mengirimkan bahan-bahan untuk mebuat celana ke tempat tinggal subjek dan dikerijakan di tempat tinggalnya. Pekerjaan ini sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh subjek dan tidak mendapatkan masalah mengenai jarak yang harus ditempuh karena dikerjakan di tempat tinggal subjek.

Subjek sudah dapat terakses bekerja di konveksi sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Subjek dalam bekerja tidak perlu menempuh jarak yang jauh karena pekerjaannya dapat dilakukan di tempat tinggal subjek. Sistem maklun diberikan oleh pemilik konveksi karena pada saat *FGD* kendala penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yaitu jarak tempat tinggal subjek yang jauh dari perusahaan.

Advokasi sosial berhasil dilakukan untuk permasalahan aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan di Desa Cimerang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Advokasi sosial dilakukan dengan harapan selanjutnya instansi maupun dunia usaha lebih tanggap terhadap permasalahan penyandang disabilitas terutama mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan. Selanjutnya subjek harus mengasah keterampilan yang dimiliki agar berkembang dan dapat membuat produk lain agar penghasilannya bertambah.

Advokasi sosial belum dapat dilakukan dalam hal penyebaran rekrutmen pegawai di dunia usaha karena untuk menyebarluaskan informasi rekrutmen pegawai membutuhkan perencanaan yang matang. Penyebarluasan informasi rekrutmen pegawai khususnya untuk penyandang disabilitas masih dipertimbangkan oleh dunia usaha. Penyebarluasan informasi rekrutmen pegawai dapat dilakukan melalui media elektronik, namun dunia usaha masih menggunakan sistem lama dengan memberitahu pegawai yang sudah bekerja di perusahaan tersebut.

Kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha adalah penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha adalah penyandang disabilitas dengan tingkat derajat rendah agar dalam menjalankan pekerjaan tidak terbebani.

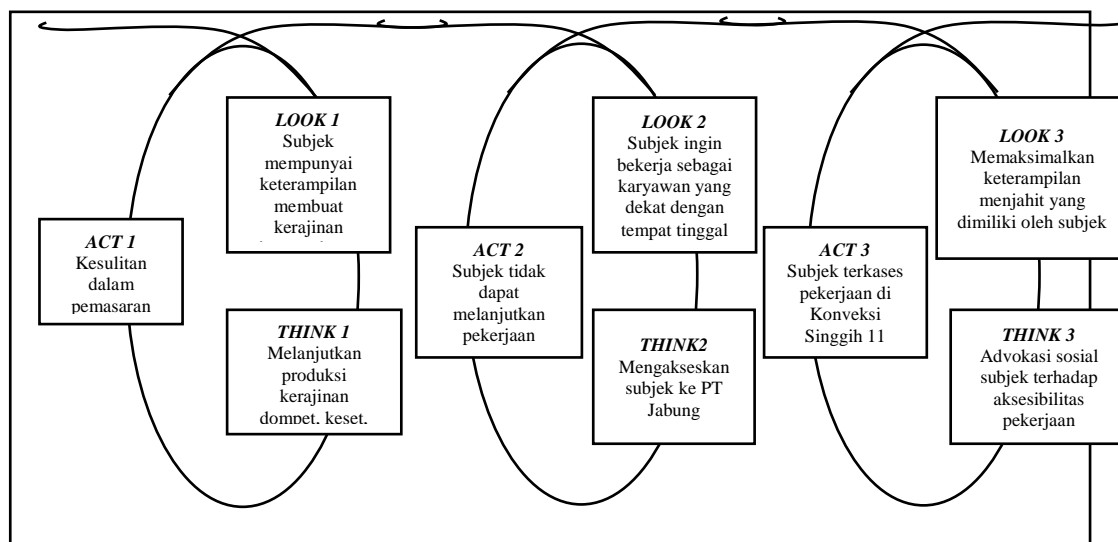
Dunia usaha yang berkomitmen dalam mengaksesskan pekerjaan kepada subjek tidak menerapkan proses tertentu, subjek tidak perlu melamar pekerjaan terlebih dahulu, namun langsung diterima bekerja di konveksi Singgih 11. Subjek terlebih dahulu

menerima pelatihan membuat celana selama dua hari oleh pegawai yang sudah lama bekerja di konveksi. Seharusnya dunia usaha menerapkan proses perekrutan agar subjek mengumpulkan administrasi ke konveksi tempat subjek bekerja.

Subjek memberikan penilaian positif kepada pemilik konveksi Singgih 11 karena sudah menyediakan pekerjaan bagi subjek walaupun subjek belum dapat membuat celana. Pemilik konveksi memberikan pelatihan terlebih dulu kepada subjek untuk membuat celana selama dua hari dengan mengirimkan pegawai yang sudah lama bekerja di konveksi tersebut. Selain itu konveksi Singgih 11 juga mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menjahit ke tempat tinggal subjek.

Sarana yang disediakan oleh pemilik Konveksi Singgih yaitu dengan mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek. Upah juga langsung diberikan kepada subjek setelah subjek menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu pemilik konveksi juga memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada subjek sebelum subjek bekerja membuat celana.

Sarana yang diberikan oleh pemilik konveksi Singgih 11 memudahkan subjek untuk bekerja karena tidak mengalami



hambatan mengenai jarak yang jauh antara tempat tinggal subjek dengan perusahaan. Subjek juga tidak mengalami hambatan menegani keterbatasan aktivitas yang dilakukan oleh subjek, serta memberikan kebebasan untuk beristirahat ketika mengalami kelelahan. Pekerjaan yang ditawarkan oleh pemilik konveksi dengan sistem maklun memberikan kemudahan tersendiri bagi subjek.

Pemilik Konveksi Singgih 11 memberikan dukungan kepada subjek dalam menyediakan pekerjaan dengan sistem maklun yaitu mengantarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat celana ke tempat tinggal subjek. Sistem maklun ini memberikan kemudahan bagi subjek karena subjek tidak mendapatkan kendala dalam mengakses ke tempat bekerja.

KESIMPULAN

Desa Cimerang merupakan salah satu desa di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Desa ini memiliki penduduk berjumlah 8660 jiwa, terdiri dari 4385 laki-laki dan 4275 perempuan, dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, terdapat 67 orang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Desa Cimerang terdiri dari penyandang disabilitas fisik 17 orang, penyandang disabilitas rungu-wicara 16 orang, penyandang disabilitas netra 6 orang, penyandang disabilitas intelektual 13 orang, penyandang disabilitas mental 11 orang, dan penyandang disabilitas ganda 4 orang.

Penyandang disabilitas di desa ini mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena belum tersedianya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dunia usaha belum memberikan

kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam menjangkau pekerjaan. Masyarakat pun belum turut serta membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Subjek dalam penelitian adalah penyandang disabilitas fisik berusia 21 tahun dan 25 tahun yang sulit mengakses pekerjaan. Penyandang disabilitas fisik sulit dalam mengakses pekerjaan disebabkan adanya faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri penyandang disabilitas yaitu kurangnya pemahaman kemampuan diri, tidak mempunyai keterampilan, dan pendidikan yang kurang sedangkan faktor dari luar yaitu sulit menjangkau pelatihan kerja, sulit mengakses informasi lowongan pekerjaan, dan belum tersedianya lapangan pekerjaan.

Penyandang disabilitas dalam mengakses jenis-jenis pekerjaan yaitu kurang memahami kemampuan terhadap diri sendiri, keterampilan yang dimiliki masih terbatas, dan tidak dapat menjangkau kegiatan pelatihan kerja. Selain itu penyandang disabilitas tidak mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, belum dapat mengakses pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, dan belum dapat mengakses pekerjaan yang sesuai dengan penyandang disabilitas.

Perlakuan dunia usaha terhadap penyandang disabilitas fisik untuk menyediakan pekerjaan yaitu dunia usaha belum menyebarluaskan rekrutmen bagi penyandang disabilitas, belum adanya penetapan kriteria penyandang disabilitas yang dapat diterima oleh dunia usaha, dan belum adanya proses penerimaan dunia usaha dalam menyediakan pekerjaan bagi

penyandang disabilitas fisik. Sarana prasarana untuk penyandang disabilitas fisik belum disediakan oleh dunia usaha, tidak adanya pengembangan kemampuan yang disediakan oleh dunia usaha, serta belum adanya dukungan dari dunia usaha untuk menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik.

Aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pekerjaan, dilakukan dengan teknik advokasi sosial. Advokasi sosial dilaksanakan dengan langkah-langkah mencari akar permasalahan, merencanakan penyelesaian masalah, membangun kesadaran, tindakan kebijakan. Mencari akar permasalahan dilakukan dengan teknik *Focus Group Discussion (FGD)* yang dihadiri oleh Kasie Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, pemilik Konveksi Singgih 11, Kepala Sift PT Jamafac, Aparat Desa Cimerang, pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Desa Cimerang, serta perwakilan penyandang disabilitas fisik dan keluarga penyandang disabilitas.

Langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah, perencanaan dilakukan di hari kedua setelah adanya *FGD*. Perencanaan dilakukan bersama-sama dengan *stakeholder* dan penyandang disabilitas fisik agar terakses oleh pekerjaan. Beberapa perencanaan yang tersusun yaitu mengakseskan penyandang disabilitas ke pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki yaitu keterampilan menjahit dan melaksanakan ekonomi produktif. Berdasarkan kesepakatan partisipan yang hadir, mengakseskan penyandang disabilitas ke pekerjaan merupakan solusi bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses pekerjaan.

Selanjutnya yaitu membangun kesadaran *stakeholder* (dunia usaha) agar mau menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik. Dunia usaha yang hadir dalam pertemuan *FGD* aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pekerjaan dan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas diberika penalaran apabila permasalahan yang ada tidak ada solusi, maka akan menimbulkan masalah baru.

Hasil dari membangun kesadaran dengan adanya tindakan kebijakan, Konveksi Singgih 11 menyediakan pekerjaan membuat celana dan baju tidur bagi penyandang disabilitas fisik. Konveksi Singgih 11 menyediakan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik dengan cara maklun, yaitu mengantarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat celana dan baju tidur ke tempat tinggal penyandang disabilitas. Tindakan tersebut dilakukan agar penyandang disabilitas fisik tidak terhambat oleh tempat tinggal yang jauh dari konveksi. Sebelum penyandang disabilitas diberikan pekerjaan, terlebih dahulu diberikan pelatihan untuk membuat celana dan baju tidur oleh pegawai Konveksi Singgih 11.

Setelah pelaksanaan advokasi sosial, penyandang disabilitas fisik dapat mengakses pekerjaan. Perubahan yang terjadi dalam aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap jenis-jenis pekerjaan yaitu penyandang disabilitas lebih memahami kemampuan diri, keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas meningkat yaitu dapat membuat celana dan baju tidur, dan dapat menjangkau pelatihan kerja yang disediakan oleh pemilik konveksi. Selain itu penyandang disabilitas fisik juga dapat mengakses pekerjaan yang

ada di lingkungan sekitar dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Perlakuan dunia usaha menunjukkan adanya peningkatan, yaitu mendukung penyediaan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik, adanya kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan, serta menyediakan sarana dan prasarana. Namun demikian dunia usaha belum menyebarluaskan rekrutmen pegawai bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan. Penyebarluasan rekrutmen pegawai belum dapat dilakukan karena dalam penyebarluasan rekrutmen harus direncanakan dalam jangka waktu panjang.

Kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan yaitu keterampilan yang dimiliki penyandang disabilitas fisik masih terbatas dan harus mendapatkan pelatihan tambahan. Selain itu penyandang disabilitas fisik harus menunggu bahan yang diperlukan untuk menjahit dihantarkan oleh pegawai konveksi, sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas menyelesaikan tugas sesuai dengan bahan yang diberikan pemilik konveksi kepada penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin. 2016. *Jurnal Komunikasi Nonverbal antara Guru dan Siswa Tuna Wicara SLBN Somba Opu Kabupaten Gowa*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Cresswell, John W. 2012. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approach*. London : Sage Publications, Inc.
- Dodi Ahmad Kurtubi. 2017. *Membangun Masyarakat Inklusif, Adil dan Berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas*. Riau : Dinas Sosial Riau
- Etza Oktavia Utami, dkk. 2018. *Jurnal Aksesibilitas Penyandang Tuna Daksa*. Bandung : Universitas Padjajaran
- Handoko. 2010. *Jurnal Aksesibilitas Publik bagi Penyandang Cacat di Indonesia*. Tangerang : Universitas Pelita Harapan
- Lexi J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Putu Nia R. 2016. *Jurnal Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di halte dan Bus Trans Jogja di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
- Robert F. Drake. 2010. *Understanding Disability Policies*. London : Macmillan Press LTD
- Stringer, Ernest T. 2007. *Action Research Third Edition*. USA : Sage Publication
- Utomo. 2016. *Jurnal Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Menempuh Pendidikan Tinggi*. Lampung : Prodi PLB FKIP Universitas Lampung
- Zulfah Latuconsina. 2014. *Jurnal Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.